

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk melaksanakan roda pemerintahan di suatu negara atau bangsa, anggaran dana dibutuhkan untuk melakukan suatu pertumbuhan ekonomi. Anggaran ialah pernyataan dan/atau daftar yang di dalamnya terdapat rincian akan laporan keuangan negara yang sudah diharapkan dalam kurun waktu tertentu baik berupa pengeluaran atau penerimaan (Suparmoko, 2000).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran merupakan alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Pemerataan dalam pendapatan untuk mencapai tujuan negara serta stabilitas dan pertumbuhan ekonomi bisa diwujudkan dengan fungsi dari sebuah anggaran dan kebijakan ekonomi. Setiap tahunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menyusun secara rinci dari laporan terkait anggaran yang baik berupa pengeluaran dan penerimaan dari pemerintah.

Rencana keuangan pemerintahan suatu negara dalam kurun waktu tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinamakan APBN. Atau bisa dibilang APBN ini adalah sebuah perwujudan dari pengelolaan keuangan negara yang dihimpun dari pendapatan negara itu sendiri dengan kebutuhan dari

penyelenggaraan pemerintahan yang sudah tersusun di dalamnya. APBN ini sebagai alat utama yang digunakan oleh pemerintah sebagai usaha untuk mengelola perekonomian dan dalam rangka menyejahterakan rakyatnya.

Pelaksanaan anggaran merupakan salah satu tahap dalam satu siklus pengelolaan APBN. Berjalannya fungsi pemerintahan dapat dicerminkan melalui besaran pagu anggaran yang dapat diserap atau direalisasikan. Dalam hal mendorong percepatan penyerapan anggaran, pemerintah melakukan reformasi dengan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang digunakan untuk memperkuat dasar pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui hal ini penyerahan kekuasaan kepala daerah oleh presiden sebagai kepala pemerintahan untuk mengelola keuangannya sendiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut (BBC News Indonesia, 2021) pada akhir tahun 2019 terdeteksi virus SARS-CoV-2 di Kota Wuhan, China dan pada Juni 2021 telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Virus *Corona* merupakan virus yang menyerang system pernapasan manusia. Infeksi virus ini dikonfirmasi pertama kali pada 2 Maret 2020 di Indonesia. Pandemi ini memberikan dampak pada perekonomian di Indonesia sehingga pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap APBN dan APBD guna penanganan wabah COVID-19.

Pemulihan pasca pandemi COVID-19 diharapkan terjadi di tahun 2021. Ketersediaan vaksin memengaruhi kinerja perekonomian nasional dengan mulai membaiknya perekonomian. Namun, risiko ketidakpastian perlu dipertimbangkan

sehingga dilakukan penyesuaian kembali dan kebijakan untuk percepatan pemulihan ekonomi serta penguatan perbaruan di berbagai aspek akan diarahkan.

Sehubungan dengan adanya penyesuaian di dalam pelaksanaan anggaran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar, maka hal ini mendorong penulis untuk menyusun Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan judul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN DAN KOTA BLITAR SELAMA PANDEMI COVID-19 PADA TAHUN 2021”

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang telah diuraikan, penulis memperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan sistem di kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar di masa pandemi COVID-19 di tahun 2021?
2. Bagaimana kemampuan pelaksanaan anggaran dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar pada tahun 2021?
3. Apa saja risiko yang dihadapi di dalam pelaksanaan anggaran dan bagaimana langkah untuk mitigasinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir kali ini didapatkan beberapa tujuan dari penulisan, yaitu:

1. Mengidentifikasi mekanisme dan sistem di kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar terkait pelaksanaan anggaran di masa pandemi COVID-19 di tahun 2021.
2. Mengetahui kemampuan pelaksanaan anggaran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar pada tahun 2021.
3. Mengidentifikasi risiko yang dihadapi di dalam pelaksanaan anggaran beserta langkah untuk memitigasi risikonya.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penyusunan karya tulis tugas akhir ini penulis membatasi penulisan ruang lingkupnya atas topik pelaksanaan anggaran selama pandemi COVID-19 pada tahun anggaran 2021 dengan objek yang diteliti adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar. Karya tulis ini juga membahas terkait risiko yang dihadapi terkait dalam pelaksanaan anggaran beserta mitigasinya.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya tulis ini disusun oleh penulis guna memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya karya tulis tugas akhir ini dapat meningkatkan wawasan bagi pembaca terkait dengan pelaksanaan anggaran di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar pada tahun anggaran 2021 selama masa pandemi COVID-19.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan karya tulis tugas akhir ini bisa dijadikan bahan diskusi dan menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai pelaksanaan anggaran

di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar pada tahun 2021 selama masa pandemi COVID-19.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan berisikan gambaran secara umumnya terkait dengan karya tulis tugas akhir. Mulai dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan terdapat pada bab ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi tentang gambaran mengenai landasan teori sebagai bahan pembahasan karya tulis tugas akhir ini. Teori dalam bab ini berupa literatur mengenai pelaksanaan anggaran serta peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan mengelola terkait pelaksanaan anggaran yang terjadi dalam ruang lingkup Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III Metode dan Pembahasan merupakan bagian inti yang berisikan pembahasan topik karya tulis yaitu mengenai pelaksanaan anggaran. Penulis juga akan meninjau terkait dengan proses pelaksanaan anggaran pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV Penutup berisikan simpulan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis untuk menjawab tujuan penulisan karya tulis tugas akhir. Penulis juga berharap hasil analisis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.